TINJAUAN YURIDIS PENYIARAN PERSIDANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA LIVE: KAITANNYA TERHADAP ASAS-ASAS HUKUM ACARA PIDANA

Made Shanti Karmani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: shanti.karmani04@gmail.com

Ni Nengah Adiyaryani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nengah_adiyaryani@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i08.p15>

ABSTRAK

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaturan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live dan mengkaji penyiaran tahapan sidang kasus korupsi dengan beberapa asas hukum acara pidana. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif yakni merupakan pendekatan dengan mengkaji dan menerapkan data-data yang ada terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam permasalahan pada bahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyiaran Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Live : Kaitannya Terhadap Asas-Asas Hukum Pidana. Metode yuridis normatif ini dipadukan dengan jenis analisis interpretasi data yang menggunakan sumber data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terdapat aturan-aturan mengenai penyiaran dan keterbukaan suatu sidang, tetapi belum ada ketentuan mengkhusus mengenai perizinan maupun batasan atas penyiaran sidang perkara tindak pidana korupsi secara live. Kemudian jika dikaitkan dengan asas-asas hukum acara pidana, penyiaran oleh pers jika tidak dibatasi akan menyimpang terhadap beberapa asas hukum mengenai acara pidana. Kedudukan asas ini sendiri sebagai dasar pedoman berperilaku dalam penyiaran persidangan secara live. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live jika tidak diberikan batasan maka bisa terjadi pertentangan terhadap asas praduga tidak bersalah, asas keadilan, dan asas pembuktian dalam hukum pidana.

Kata kunci: *penyiaran persidangan, tindak pidana korupsi, asas hukum acara pidana*

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the arrangements for live broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption and to examine the broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption using the principles of criminal procedural law. The research method used in this research is a normative juridical method, namely an approach that examines and applies existing data to the applicable laws and regulations in the problem discussed in the Juridical Review of Live Broadcasting of Corruption Crime Case Trials: Their Relation to Principles of Criminal Law. This normative juridical method is combined with a type of data interpretation analysis that uses primary and secondary data sources. The results of this research show that there are regulations regarding broadcasting and openness of trials, but there are no specific provisions regarding licensing or limits on broadcasting live trials of corruption cases. Then, if it is related to the principles of criminal procedural law, broadcasting by the press if not limited will be contrary to the principles of criminal procedural law. The position of this principle itself is the basis for behavioral guidelines in broadcasting live trials. It can be concluded that the existence of live broadcasting of the trial process for criminal acts of corruption, if there are no restrictions, could result in a conflict with the principle of presumption of innocence, the principle of justice and the principle of proof in criminal law.

Key words: broadcasting of trials, criminal acts of corruption, principles of criminal procedure law

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pergerakan zaman kian terjadi seiring waktu berjalan. Di setiap bidang kehidupan selalu ada saja yang berubah. Peningkatan-peningkatan terus dilakukan demi mengisi kebutuhan manusia yang tidak ada habisnya. Suatu bentuk perkembangan zaman nampak menonjol yakni di bidang teknologi. Dalam bidang teknologi ini sangat erat kaitannya dengan ditemukannya internet yang kemudian dapat menjadi jembatan penghubung antar masyarakat tanpa batasan jarak dan waktu. Penyebaran informasi yang sangat massif, menjadi asupan masyarakat setiap harinya. Informasi ini dapat berupa tulisan, audio, maupun video. Suatu bentuk sarana teknologi informasi yang diminati masyarakat adalah yang memiliki tampilan paling kompleks yakni berupa tayangan televisi maupun *youtube*. Hadirnya sarana teknologi informasi berupa televisi dengan informasi yang ditampilkan menaruh andil cukup massif terhadap penikmat media.¹

Satu contoh fenomena yang terjadi di lapangan adalah penyiaran tahapan persidangan di pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi. Penyiaran persidangan dapat disaksikan secara live melalui kanal *youtube*, media sosial, maupun siaran televisi. Hal ini contohnya terjadi pada persidangan tersangka Harvey Moeis atas kasus Dugaan Korupsi Timah. Persidangan perdana secara live tersebut ditayangkan dalam kanal *Youtube Kompas.com*. Penyiaran yang dilakukan secara live ini pastinya dapat disaksikan oleh siapapun, dapat berada di penjuru tempat, dan dalam situasi apapun. Tentu fenomena ini dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada khalayak umum mengenai bagaimana proses persidangan di pengadilan maupun mengenai kasus yang sedang dibahas. Hal tersebut memunculkan pengaruh baik dan tidak baik. Pengaruh baiknya yakni dengan adanya penayangan tersebut dapat dijadikan bahan pembelajaran bagi pelajar, mahasiswa, atau penekun di bidangnya untuk lebih mengerti bagaimana persidangan secara langsung dan juga dapat memberikan keterbukaan sehingga persidangan dapat terhindar dari perilaku tidak bertanggung jawab. Namun penayangan ini juga bisa memberikan dampak negatif berupa terancamnya independensi pengadilan dalam memutus perkara karena dipantau oleh publik dimana pandangan publik itu sendiri dapat berupa pandangan akbat giringan opini melalui media massa.

Dapat diketahui bahwa penayangan persidangan secara live ini dasar hukumnya adalah adanya pengaturan mengenai sidang yang dibuka untuk publik. Dasar hukum ini dimuat pada Pasal 153 Ayat (3) KUHP dimana ketentuan ini menentukan bahwa "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak." Pengaturan ini memberikan kesempatan untuk media masa menyiarkan proses sidang secara live kepada masyarakat umum. Asas mengenai sidang yang dibuka terhadap khalayak umum, mengizinkan publik untuk berkesempatan mengetahui tahapan suatu persidangan secara nyata. Keberadaan asas ini ditujukan

¹ Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 24, no. 3 (2017): 489.

agar prosedur tahapan persidangan dapat diketahui jelas dan terang oleh seluruh masyarakat.²

Namun penyiaran yang bebas tanpa batas juga dapat memunculkan dampak-dampak buruk seperti terancamnya hak terdakwa atas praduga tak bersalah dan bisa membuka celah terjadinya penggiringan opini oleh media terkait kasus yang sedang terjadi. Sehingga kebebasan pers ini perlu diberikan pembatasan oleh hukum berupa penerapan asas-asas hukum salah satu diantaranya ialah penerapan asas-asas hukum acara pidana. Contohnya yakni asas praduga tak bersalah, asas keadilan, asas privasi, dan asas pembuktian.

Keberadaan asas-asas hukum sangatlah penting untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Asas hukum acara pidana memberikan dasar untuk menentukan perbuatan yang melanggar hukum dan memberikan sanksi atau hukuman yang setimpal. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan di masyarakat dan memberikan penghukuman kepada pelaku kejahatan sebagai upaya pencegahan dan penegakan keadilan. Selain itu melalui proses peradilan yang adil, asas hukum acara pidana memberikan jaminan bahwa siapapun berhak membela diri, hak privasi, dan hak atas keadilan. Hal-hal tersebut diatas mengenai pentingnya keberadaan asas hukum acara pidana tentunya juga termasuk penerapannya terhadap mekanisme penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live.

Ada beberapa penelitian yang mengangkat tema serupa dengan penelitian ini yaitu membahas Penyiaran Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Live, pertama penelitian yang dilakukan oleh Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, dilakukan pada tahun 2020 berjudul "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana".³ Penelitian ini membahas mengenai kaitan asas sidang terbuka untuk umum dengan penyiaran proses persidangan pidana, dibandingkan dengan penelitian ini bahwa sama-sama meneliti tentang penyiaran proses sidang tetapi dalam tindak pidana korupsi dan penelitian ini lebih memfokuskan mengenai kaitannya terhadap asas-asas hukum acara pidana lainnya. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vida Azaria dan I Ketut Mertha, dilakukan pada tahun 2018 berjudul "Keterkaitan Asas *Presumption Of Innocence* Didalam Pemberitaan Pers".⁴ Penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran asas *Presumption of Innocence* sendiri dalam pemberitaan yang dilakukan media massa, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada keterkaitan beberapa asas hukum untuk acara pidana yang terdiri dari asas praduga tidak bersalah, asas keadilan, dan asas pembuktian, dengan penyiaran sidang kasus korupsi yang ditayangkan langsung atau live di platform digital. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemberitaan oleh pers harus memperhatikan hak-hak tersangka dan netralitas sidang sebagaimana ketentuan asas -asas hukum acara pidana, penelitian ini dirasa penting mengingat masifnya penayangan persidangan secara online di era sekarang dan tentu akan semakin berkembang kedepannya, sehingga penting untuk

² El Hilmi, Hafidz and Astuti, Pudji. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online." *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 70.

³ Desak Paramita Brata, Ni Putu Rai Yuliantini, dan Dewa Gede Sudika Mangku, "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020).

⁴ Vida Azaria and I Ketut Mertha. "Keterkaitan Asas *Presumption of Innocence* Didalam Pemberitaan Pers." *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018).

mengetahui batasan-batasan yang dapat menjaga objektivitas penayangan proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara online.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas, kemudian dapat dirumuskanlah masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyiaran secara live proses persidangan perkara tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia?
2. Bagaimana kedudukan asas hukum acara pidana terhadap penyiaran persidangan tindak pidana korupsi secara live di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterkaitan persidangan kasus korupsi secara live dengan beberapa asas hukum untuk acara pidana agar penyiaran sidang secara live ini tetap sejalan dengan asas-asas hukum acara pidana. Serta sejauh mana penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live dapat dilaksanakan jika ditinjau dari segi yuridis berdasarkan asas-asas hukum acara pidana. Dengan begitu para pihak terkait dengan penyiaran tahapan persidangan kasus korupsi secara live tidak kebingungan dalam menentukan batasan penyiarannya dan menuntun mereka untuk menaati ketentuan sebagaimana mestinya.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa metode yuridis normatif yakni merupakan pendekatan dengan mengkaji dan menerapkan data-data yang ada terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam permasalahan yang terjadi pada bahasan Tinjauan Yuridis Terhadap Penyiaran Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi Secara Live: Kaitannya Terhadap Asas-Asas Hukum acara pidana. Metode yuridis normatif ini dipadukan dengan jenis analisis interpretasi data yang menggunakan sumber data primer yakni peraturan perundang-undangan, dan teks-teks dari sumber resmi berupa jurnal dan buku terkait dengan pembahasan penyiaran proses persidangan kasus korupsi dan asas hukum untuk acara pidana. Penggunaan bahan hukum dalam bentuk primer berupa perundang-undangan dalam penelitian ini terdiri dari; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Surat Edaran Mahkamah Agung no 4 Tahun 2012 mengenai Perekaman Proses Persidangan.

Untuk sumber data sekunder, terdiri dari segala publikasi mengenai hukum yakni berupa teks-teks dari sumber resmi. Publikasi mengenai hukum ini meliputi buku dan jurnal. Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah studi kepustakaan, yakni mengkaji peraturan dengan menggunakan buku-buku, artikel, dan sumber sejenis, yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini. Selanjutnya hasil penelitian ini akan dirangkai dalam bentuk deskriptif dengan menjelaskan tiap-tiap variabel yang dikaji kemudian diambil kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengaturan penyiaran secara live proses persidangan perkara tindak pidana korupsi dalam hukum positif di Indonesia.

Fenomena yang terjadi di lapangan atas kemajuan teknologi yang menyebabkan tersebarnya informasi secara massif salah satunya adalah penyiaran suatu tahapan secara nyata atas persidangan di pengadilan terkait perkara tindak pidana korupsi. Penyiaran ini dapat disaksikan secara live melalui kanal *youtube*, media sosial, maupun siaran televisi. Tentu fenomena ini dapat memberikan pengetahuan tambahan kepada khalayak umum mengenai bagaimana proses persidangan di pengadilan maupun mengenai kasus yang sedang dibahas. Namun sangat penting untuk diterapkan batasan atas hal tersebut agar tidak terlalu bebas dalam penyiaran maupun penyebarannya karena pasti akan memiliki dampak buruknya juga.

Untuk itu maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live ini seperti apa agar orang-orang memiliki pedoman untuk pembatasan atau bimbingan mengenai sejauh mana dapat bertindak dalam penyiaran proses persidangan atas suatu kasus korupsi yang secara langsung ditayangkan pada platform digital.

Asas hukum mengenai acara pidana yang menjadi dasar penayangan tahapan sidang perkara tindak pidana korupsi secara live adalah asas sidang terbuka untuk umum. Asas sidang terbuka untuk umum mengandung makna pengadilan sesungguhnya layak diketahui oleh berbagai pihak secara umum, dengan maksud agar masyarakat secara luas mampu mengawasi alur sidang sehingga kepastian atas keputusan dari hakim mampu dipertanggungjawabkan.⁵

Dalam ketentuan hukum di Indonesia, ada peraturan-peraturan yang menjadi dasar ketentuan penyiaran proses persidangan kasus korupsi secara live meliputi KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang no. 40 Tahun 1999 mengenai Pers, Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana sudah diubah menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran. Kelima peraturan ini memiliki peran penting dalam mengatur ketentuan terkait penyiaran persidangan perkara pidana secara live.

Pada hakikatnya persidangan itu dapat diketahui dan disaksikan oleh masyarakat umum, kecuali dalam hal-hal menyangkut perkara atas tindak asusila maupun yang memiliki terdakwa kategori belum cukup umur. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 153 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menentukan bahwa "Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang, membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak". Atas keberadaan aturan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan pasal ini dapat ditafsirkan seperti membuka jalan terhadap pers untuk melakukan siaran atas suatu sidang.⁶

⁵ Soeharto and Jonaedi Efendi. *Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. (Jakarta: Prenada Media, 2016), 39.

⁶ S. Suisno, and Munif Rochmawanto. "Penyiaran Sidang Melalui Media Televisi Dikaitkan Dengan Larangan Saksi Satu Sama Lain." *Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2018): 67.

Selain itu, Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa "Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum."⁷

Ketentuan pasal tersebut berkesinambungan dengan pernyataan Bagir Manan bahwa suatu putusan sekaligus ia terucap, maka putusan tersebut dimiliki oleh khalayak umum. Sebab diucapkan pada persidangan yang terbuka membuat putusan itu dimiliki khalayak umum dan bukan hanya untuk mereka yang bersangkutan dengan perkara. Namun siapapun yang berkepentingan juga memiliki hak untuk tahu aka nisi putusan tersebut.⁸

Pada ketentuan pasal 36 ayat (4) Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran menentukan yakni "Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu". Dengan keberadaan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada penayangan tahapan suatu sidang, tidak boleh mengandung penyiaran hal-hal yang mengandung opini, yang dapat memunculkan adanya sidang bentukan oleh masyarakat umum atau yang biasa disebut dengan trial by press, sebab hal ini bisa menimbulkan situasi dimana tidak netralnya suatu lembaga dalam melakukan penyiaran proses persidangan perkara pidana secara live.

Selain ketentuan bahwa isi siaran wajib untuk netral, terdapat juga pengaturan di Undang-Undang no. 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran yakni pada Pasal 36 Ayat (5), menentukan mengenai kandungan siaran yang dilarang, bahwa "Isi siaran dilarang:

- a) Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong;
- b) Menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang; atau
- c) Mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan."⁹

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers mengatur bahwa "Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah."¹⁰

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, diberikan jaminan atas untuk mendapatkan kekeluasaan informasi dalam hal kasus dugaan tindak pidana korupsi. Namun penjaminan hak tersebut tentu memiliki batasan. Sebab itulah keterbukaan tersebut harus dibatasi asas *fair trial* bagi terdakwa yang didasarkan baik pada konstitusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik

⁷ Kamri Ahmad and Hardianto Djanggih. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 24, no. 3 (2017): 492.

⁸ Ibid.

⁹ Feibe A. Kasengkang. "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002." *Lex Privatum* 5, no. 3 (Mei 2017): 78.

¹⁰ Eddy Rifai. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*. (Bandar Lampung: Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010), 46.

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHP).¹¹

Undang-Undang no. 48 Tahun 2009 mengenai Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 13 mengatur mengenai bagaimana sidang yang dibuka untuk publik, pasal ini menentukan:

1. Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
2. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.¹²

Diluar pasal-pasal yang dicantumkan pada bagian sebelumnya, terdapat peraturan lain yang memuat tentang penyiaran persidangan secara langsung yakni:

- Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2012 mengenai Perekaman Proses Persidangan. SEMA yang telah ditetapkan memiliki maksud agar memastikan proses dilaksanakannya tahapan sidang yang sifatnya lebih transparan, terukur dan juga teratur.¹³ Namun dalam surat edaran tersebut juga tidak mengatur secara jelas mengenai penyiaran sidang secara langsung, melainkan hanya ditentukan mengenai proses perekaman suatu persidangan dalam tujuannya untuk dijadikan arsip digital oleh pengadilan, yang mana rekaman tersebut sendiri dikelola oleh kepaniteraan. Sehingga dalam hal ini berarti belum diatur bagaimana jika rekaman tersebut dilakukan dan dipergunakan oleh publik maupun disiarkan secara langsung kepada publik.
- Kemudian ada juga aturan etika jurnalistik yang menentukan bahwa "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah", jadi telah terdapat aturan wajib terhadap para wartawan dalam tugas mencari informasi supaya memfokuskan pada fakta-fakta bukan hanya memperhatikan opini saja ketika melakukan penyampaian berita. Pada ketentuan tata tertib sidang secara umum, izin atas suatu proses sidang terletak pada hak jabatan Hakim Ketua Sidang. Hal ini mengenai boleh atau tidak bolehnya diambilnya gambar, suara, maupun video yakni berdasarkan perizinan dari Hakim yang berwenang.¹⁴

¹¹ Prahassacitta, Vidya. 2017. "Keterbukaan Dan Fair Trial Dalam Siaran Langsung Persidangan Pidana". <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/keterbukaan-dan-fair-trial-dalam-siaran-langsung-persidangan-pidana/>

¹² Vincentius Patria Setyawan and Itok Dwi Kurniawan. "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik. *Sol Justicia* 5, no. 1 (Juni 2022): 4.

¹³ Ardilla, Merti, Elis Rusmiati, and Ijud Tajudin. "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 38.

¹⁴ Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 84.

3.2. Kedudukan asas hukum acara pidana terhadap penyiaran persidangan tindak pidana korupsi secara *live* di Indonesia.

a. Asas praduga tidak bersalah.

Asas praduga tidak bersalah yang merupakan salah satu asas hukum mengenai acara pidana merupakan suatu pedoman dimana diharapkan sebagai dasar untuk menempatkan siapapun yang disangkakan atas suatu tindak pidana, atau ditahan, dituntut, maupun dihadapkan di depan pengadilan, tidak menjadi bersalah jika belum mendapatkan putusan pengadilan atas tindak pidananya dan adanya kekuatan hukum tetap.¹⁵ Penyiaran persidangan atas kasus korupsi secara *live* harus memperhatikan asas praduga tidak bersalah ini dengan memastikan bahwa komentar atau penilaian terhadap tersangka atau terdakwa tidak diberikan sebelum ada putusan pengadilan.

Asas praduga tidak bersalah pengaturannya terdapat pada pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers yang mengatur bahwa "Pers nasional dalam siaran informasi, tidak menghakimi atau membuat kesalahan sendiri kesimpulan seseorang, terutama untuk kasus-kasus yang masih dalam proses pengadilan dan dapat mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat dalam artikel." Dalam aturan lain pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 mengenai Pers juga mengharuskan para jurnalis untuk tunduk pada Kode Etik Jurnalistik.¹⁶

Dalam aturan etika jurnalistik tersebut menentukan yakni "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah"

Bagian peneliti yang bertugas dalam BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional) kementerian HAM negara Indonesia menghasilkan suatu riset atas kegiatan penayangan secara langsung oleh pihak program TV, dan ditemukanlah bahwa terdapat suatu tindakan courtroom television. Praktek courtroom television dinyatakan artinya sebagai proses penyiaran yang ditayangkan langsung atau bisa berbentuk tayangan kembali mengenai perkara yang dalam tayangan tersebut lebih menyudutkan pihak tersangka. Praktek ini khawatirnya bisa mewujudkan perbuatan trial by the press. Sebagaimana riset yang dilakukan BPHN yang dilakukan di tahun 2013, Trial by The Press atau diistilahkan sebagai "pengadilan oleh pers" adalah suatu kegiatan ketika media massa salah-olah mengambil andil sebagai lembaga yang mengadili dan ikut melakukan penggalian fakta, analisa, dan pengkajian sendiri yang kemudian melalui tindakan itu dapat membantu penelesaian suatu hukuman atas kasusnya.¹⁷ Hal ini berpotensi menyebabkan contempt of court, yakni berarti suatu penghinaan yang dilontarkan kepada pengadilan.¹⁸ Hal ini juga dapat

¹⁵ Butarbutar, E. Nurhaini. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 471.

¹⁶ Vida, Op.Cit., 4.

¹⁷ Luh Ayu Krisnanda Sari Anggreni Pradnyaswari and A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi. "Analisis Trial By the Press Oleh Media Massa Terhadap Penerapan Asas *Presumption of Innocence*." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2023): 184.

¹⁸ Kamri, Op.Cit., 489.

menyebabkan “prejudgement” yakni pendahuluan putusan hakim.¹⁹ Peristiwa tersebut tentunya melanggar asas dugaan tidak bersalah.

Asas praduga tidak bersalah ini pengaturannya termuat dalam Pasal 3 huruf c KUHAP dimana ditentukan “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.²⁰ Aturan-aturan yang diatur dalam KUHAP membentuk prosedur hukum yang mencegah diskriminasi antara pihak-pihak yang terkait dan menjamin perlindungan hak terdakwa maupun korban kejahatan.²¹

Namun, dengan apa yang nampak di lapangan, bukan hal yang jarang suatu media massa memasukkan opini pribadi terhadap informasi yang mereka sampaikan, secara umum seringkali media massa terlebih dahulu menerapkan prasangka bersalah dan menyiarkan berita yang belum memiliki konfirmasi bersih, bahkan tidak jarang media mencantumkan identitas atau foto tersangka meskipun keadaan masih dalam fase menjadi tahanan, hal ini biasa terjadi khususnya dalam pemberitaan yang dianggap panas sebab berkaitan di dalamnya berupa pejabat pemerintahan maupun pemberitaan mengenai tindakan kriminal.²²

Pertentangan atas asas praduga tidak bersalah memungkinkan terjadi jika terpublikasinya pendapat pribadi penulis yang dimasukkan ke dalam informasi yang mereka sampaikan maupun misinformasi dari sumber yang belum terverifikasi kebenarannya dapat berujung pada trial by press, sehingga masyarakat memiliki anggapan-anggapan yang tidak tentu dapat dibuktikan kebenarannya di pengadilan dan tidak berkepastian hukum dengan jelas, dimana hal ini cenderung merugikan hak tersangka terutama terkait asas praduga tidak bersalah. Penjagaan atas hak terdakwa tidak berarti suatu bentuk perlindungan yang melebihi porsi bagi seorang tersangka, tetapi sebenarnya cenderung mewujudkan suatu keseimbangan dalam peradilan, sebab pada dasarnya posisi tersangka ketika dihadapkan di depan pengadilan itu memiliki kedudukan yang lebih lemah dari penegak hukum.²³

b. Asas keadilan

Asas keadilan ini sama artinya dengan penyamarataan, tetapi tidak berarti setiap pihak mendapatkan porsi yang sama rata. Namun setiap perkara harus memiliki peninjauan tersendiri berdasarkan poin-poin yang telah ditentukan, seperti hak dan kewajiban seseorang. Kadang kala dengan konsep ini tidak setiap orang merasakan apa yang diterimanya adalah adil, sebab yang didapat

¹⁹ Diah Vina Laoka Boru Sitorus, I. Gede Artha, and I. Ketut Sudjana. "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* 7, no. 4 (Agustus 2018): 9.

²⁰ Brata, Op.Cit., 80.

²¹ Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi and I Dewa Gede Dana Sugama. "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1556.

²² Vida Op.Cit., 2.

²³ Ibid, h. 5.

adalah porsi yang sesuai dengan hak dan kewajiban seseorang.²⁴ Asas keadilan ini keberadaannya sangatlah penting dalam proses peradilan termasuk dalam peradilan atas kasus korupsi. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 5 ayat (1) menentukan bahwa "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."²⁵ Hal tersebut berarti hakim sangat diharuskan untuk menerapkan asas keadilan ini dalam penjatuhan putusannya. Namun dalam praktiknya ada saja hal yang dapat menjadi tantangan bagi penerapan asas keadilan oleh hakim ini. Salah satunya adalah opini publik yang dampak negatifnya memungkinkan untuk menekan hakim dalam menjatuhkan putusan, padahal opini publik tersebut belum tentu jelas telah terkonfirmasi sebagaimana faktanya.

Opini publik ini dalam prakteknya dapat terbawa atau tergiring melalui keberadaan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live. Sehingga untuk menanggulangi dampak negatif yang dapat terjadi melalui penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live ini, perlu juga diterapkan asas keadilan.

Karena meski posisi jurnalis atau media memiliki kebebasan, tetapi tidak termasuk bebas memasukan opini pribadi dan menggiring publik, melainkan jurnalis boleh kebebasan untuk menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kode etik. Artinya jurnalis atau pers bukan serta merta tidak menerapkan suatu pertimbangan lain, yang dalam hal ini juga mengenai independensi peradilan, dan hakim.²⁶

Secara konseptual, keadilan memiliki asal kata adil yang mengandung makna tidak berat sebelah sesuai dengan hak dan kewajiban, serta kesetaraan. Keadilan merupakan suatu konsep yang di dalamnya adanya rasa keadilan dalam memperlakukan suatu hal.²⁷ Keadilan ini harus diterapkan dalam menilai para pihak di pengadilan, bahwa harus memperhitungkan porsi keadilan yang layak diterima saksi, korban, terdakwa, maupun pihak lainnya yang bersangkutan ketika melakukan penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live.

c. Asas pembuktian

Pada penyiaran tahapan sidang atas kasus korupsi secara langsung melalui media masa, setiap orang yang menontonnya dapat melihat dan dapat juga mendengar hal-hal apa yang terjadi dalam ruang sidang tersebut, padahal di sisi lain para saksi terhadap saksi lainnya dilarang untuk mendengarkan pernyataan satu sama lain di dalam persidangan. Namun dalam situasi penyiaran sidang secara langsung ini maka saksi yang dipanggil untuk meberikan keterannya dapat dengan jelas melihat dan mendengar keterangan yang telah disampaikan

²⁴ Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. 2021. Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Di Indonesia. mh.uma.ac.id. <http://surl.li/ueacym>

²⁵ Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, and Ade Mahmud. "Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 97.

²⁶ Diah Op.Cit., 10.

²⁷ Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 402.

oleh saksi lain pada saat persidangan berlangsung melalui penyiaran secara live.²⁸ Sehingga peristiwa ini dapat menyebabkan tidak netralnya kesaksian saksi.

Pada KUHAP Pasal 159 ayat (1) menentukan “Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang”²⁹. Pada penyiaran sidang yang disaksikan langsung oleh khalayak umum juga memberikan ruang terhadap para saksi untuk saling mendengarkan kesaksian masing-masing yang disampaikan di dalam sidang. Sehingga dapat dikatakan bahwa penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live ini bertentangan dengan asas pembuktian sebagaimana juga tercantum pada ketentuan Pasal 159 ayat (1) KUHAP tersebut.

Asas-asas hukum acara pidana merupakan pedoman dasar untuk melaksanakan proses peradilan. Asas-asas ini dijadikan tolak ukur dalam penegakan keadilan. Menurut Klandermann, bahwa jika ditinjau berdasarkan hukum di segi keilmuan, asas hukum memiliki fungsi pedoman dan menjelaskan serta memiliki tujuan untuk memberikan ikhtisar serta bersifat tidak normatif, karenanya asas hukum bukanlah merupakan hukum positif, maka tidak dapat diaplikasikan dalam bentuk langsung untuk menyelesaikan perkara, harus melalui penafsiran hakim. Namun bahwa jika ditinjau berdasarkan hukum positif, asas-asas hukum memiliki eksistensi terhadap yang membuat peraturan perundang-undangan juga memiliki eksistensi di hadapan hakim dalam memberi kesahan, serta menanamkan segi normatif, sebab itulah asas hukum dikatakan mengikat pihak yang bersangkutan.³⁰

Di sisi lain H.J. Homes, yang menulis buku berjudul “Betekenis van de Algemene Rechtsbeginselen voor d praktijk” menyatakan asas hukum “tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku”. Berdasarkan apa yang disampaikan H.J. Homes dapat disimpulkan beliau bermaksud asas hukum itu merupakan dasar kaidah bertindak.³¹

Sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan asas-asas hukum acara pidana yakni sebagai dasar kaidah perilaku dalam penyiaran persidangan tindak pidana korupsi secara live. Kendati demikian, asas-asas ini tentunya tidak dapat memberikan penghukuman secara langsung terhadap pelanggarnya dan tidak dapat secara spesifik memberikan batasan pengaturannya. Karena meskipun dengan adanya asas-asas hukum acara pidana dijadikan sebagai pedoman pada prosedural peradilan hingga termasuk penyiaran secara langsung sidang tindak pidana korupsi secara online kepada masyarakat umum, tetap diperlukan adanya suatu aturan yang mengatur secara pasti dan jelas mengenai batasan-batasan atas penyiaran persidangan tindak pidana korupsi secara online agar tidak terjadi penafsiran yang melenceng dan mewujudkan ketentuan hukum yang pasti dan mengikat kepada yang bersangkutan.

4. Kesimpulan

²⁸ S. Suisno, Op.Cit., 68.

²⁹ Brata, Op.Cit., 85.

³⁰ Dewa Gede Atmadja. “Asas-Asas Hukum dalam Sistem Hukum” Kertha Wicaksana 12, no. 2. (2018): 147.

³¹ Ibid.

Didasarkan atas penelitian yang sudah dilaksanakan terkait penyiaran tahapan sidang kasus korupsi secara live berikut juga kaitannya dengan beberapa asas hukum untuk acara pidana, maka dapat disimpulkan bahwa belum ada pengaturan secara mengkhusus mengenai larangan atau perizinan penyiaran maupun batasan-batasan untuk mengontrol proses penyiaran tersebut, sehingga tidak ada dasar hukum atas penyiaran tahapan sidang atas kasus korupsi dengan cara live, tahapan sidang atas kasus korupsi dengan cara live apabila tidak diberikan pengaturan akan memunculkan pertentangan dengan beberapa asas hukum untuk acara pidana diantaranya asas praduga tidak bersalah, asas keadilan, dan asas pembuktian dalam hukum acara pidana. Sehingga dipandang perlu untuk dibuatkan pengaturan mengenai penyiaran proses persidangan perkara tindak pidana korupsi secara live oleh pihak yang berwenang agar terdapat pendisiplinan secara tegas dalam penerapannya. Kemudian terhadap pihak yang terlibat secara langsung dalam persidangan di pengadilan kiranya agar tidak terpengaruh dengan giringan opini publik yang belum terkonfirmasi dengan jelas kebenarannya agar kredibilitas persidangan tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Soeharto and Efendi, Jonaedi. *Panduan praktis bila anda menghadapi perkara pidana: Mulai Proses Penyelidikan Hingga Persidangan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Rifai, Eddy. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pers*. Bandar Lampung: Program Pascasarjana Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2010.

Jurnal

- Ahmad, Kamri and Djanggih, Hardianto. "Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka untuk Umum dalam Siaran Persidangan Pidana oleh Media." *Jurnal Hukum Ius Qua Iustum* 24, no. 3 (2017): 488-505. DOI: <https://doi.org/10.20885/iustum.vol24.iss3.art8>
- Ardilla, Merti, Elis Rusmiati, and Ijud Tajudin. "Peliputan Secara Langsung Persidangan Perkara Pidana Oleh Media Televisi Dihubungkan Dengan Asas Pemeriksaan Di Pengadilan Terbuka Untuk Umum Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Acara Pidana." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 35-53. DOI: 10.21143/jhp.vol50.no1.2481
- Atmadja, Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum" *Jurnal Kertha Wicaksana* 12, no. 2. (2018): 145-155. DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/kw.12.2.721.145-155>
- Azaria, Vida, and I Ketut Mertha. "Keterkaitan Asas *Presumption of Innocence* Didalam Pemberitaan Pers." *Jurnal Kertha Wicara* 7, no. 2 (2018)1-6. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/38779>
- Brata, Desak Paramita, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana." *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 1 (2020): 79-89. DOI: <https://doi.org/10.23887/jatayu.v3i1.28837>
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Asas Praduga Tidak Bersalah: Penerapan dan Pengaturannya Dalam Hukum Acara Perdata." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 471-479. DOI: <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.207>

- El Hilmi, Hafidz and Astuti, Pudji. "Pemenuhan Asas Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Perkara Pidana Secara Online." *Novum: Jurnal Hukum* (2022): 69-87.
- Hayat. "Keadilan Sebagai Prinsip Negara Hukum: Tinjauan Teoritis dalam Konsep Demokrasi." *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 2, no. 2 (2015): 388-408. DOI: <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n2.a10>
- Kasengkang, Feibe A "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Tentang Persyaratan Program Isi Siaran Menurut Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002." *Lex Privatum* 5, no. 3 (Mei 2017): 76-83.
- Oetari, Adinda Anisa Putri Noor, and Ade Mahmud. "Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 Dikaitkan dengan Asas Keadilan dan Dasar Pemberatan Penyalahgunaan Kewenangan." *Jurnal Riset Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2021): 96-103. DOI: <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.526>
- Pradnyaswari, Luh Ayu Krisnanda Sari Anggreni and Darmadi, A.A. Ngurah Oka Yudistira. "Analisis Trial By the Press Oleh Media Massa Terhadap Penerapan Asas *Presumption of Innocence*." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 2 (2023): 183-192. DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i02.p14>
- Setyawan, Vincentius Patria and Kurniawan, Itok Dwi. "Pemenuhan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum Dalam Persidangan Secara Elektronik." *Sol Justicia* 5, no. 1 (Juni 2022): 1-7. DOI: <https://doi.org/10.54816/sj.v5i1.468>
- Sitorus, Diah Vina Laoka Boru, I. Gede Artha, and I. Ketut Sudjana. "Proses Persidangan Penyiaran Secara Langsung (Live) Di Televisi Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia." *Jurnal Kertha Wicara Universitas Udayana* 7, no. 4 (Agustus 2018): 1-14. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/41748>
- Suisno, S., Jatmiko Winarno, and Munif Rochmawanto. "Penyiaran Sidang Melalui Media Televisi Dikaitkan Dengan Larangan Saksi Satu Sama Lain." *Sosial Humaniora* 1, no. 1 (2018): 66-69.
- Trisnawathi, Anak Agung Mas Iswari and Sugama, I Dewa Gede Dana. "Persidangan Perkara Pidana Secara Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 7 (2022): 1550-1559 DOI: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i07.p07>

Website

- Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. 2021. Analisa Konsep Aturan Keadilan, Kepastian, Dan Kemanfaatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan di Indonesia. mh.uma.ac.id. <http://surl.li/ueacym>
- Prahassacitta, Vidya. 2017. Keterbukaan Dan Fair Trial Dalam Siaran Langsung Persidangan Pidana. <https://business-law.binus.ac.id/2017/03/26/keterbukaan-dan-fair-trial-dalam-siaran-langsung-persidangan-pidana/>

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76)
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)
- Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13)
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166)
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2012 tentang Perekaman Proses Persidangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 87)